

Collaborative Governance pada Manajemen Mutu Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMAN 16 Surabaya

Retno Yuniarti ¹⁾, Sri Roekminiati ²⁾, Aris Sunarya ³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email :retnoyuniarti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengamati proses dan faktor-faktor *Collaborative Governance* pada manajemen mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMAN 16 Surabaya Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2007) digunakan sebagai kajian analisis dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* pada manajemen mutu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMAN 16 Surabaya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan posisi rating saat penerimaan siswa. yang cukup signifikan yang didorong dengan adanya partisipasi dari para stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi ini terbilang aktif dengan komitmen yang tinggi serta adanya program-program terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, manajemen mutu, kualitas pendidikan

Abstract

This research aims to observe the process and factors of Collaborative Governance in quality management in improving the quality of education at SMAN 16 Surabaya. A qualitative descriptive method using the Collaborative Governance theory approach according to Ansell and Gash (2007) is used as an analytical study in this research. The data collection techniques are through interviews, documentation and observation. The research results show that Collaborative Governance in quality management in improving the quality of education at SMAN 16 Surabaya has been going well. This is proven by an increase in the rating position when accepting students. which is quite significant, which is encouraged by the participation of the stakeholders involved in this collaboration which is quite active with high commitment and the existence of integrated programs which aim to improve the quality of education.

Keywords: *Collaborative Governance*, Quality Management, Quality Of Education

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan tujuan Indonesia untuk menciptakan generasi emas di 2045, fungsi lembaga pendidikan adalah mengambil bagian penting dari pilar pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu pilar pertama “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Dalam hal ini, sekolah perlu untuk melakukan banyak transformasi, baik dari segi SDM, fasilitas sekolah, kualitas pendidikan hingga materi pembelajaran yang digunakan. Sekolah dituntut untuk bergerak cepat dan mengikuti perkembangan pendidikan

sesuai tuntutan pendidikan abad 21 saat ini. Salah satunya dengan dukungan kurikulum yang *up to date*, tenaga pengajar yang baik, sarana dan prasarana yang memadai serta manajemen sekolah yang baik merupakan kunci sukses implementasi pembelajaran abad 21. menyesuaikan diri dengan berbagaituntutan dan dinamika perubahan yang sedang dan akan terus berlangsung di abad ke-21 ini.

Manajemen merupakan infra struktur yang mempunyai peran sangat signifikan dalam merumuskan aturan- aturan kelembagaan untuk melakukan rekonstruksi dalam meningkatkan kualitas dan mutu

pendidikan. Secara praktis, manajemen pendidikan harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik dalam relevansinya untuk tujuan pendidikan institusional daerah maupun tujuan pendidikan nasional. secara sederhana Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat- alat yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Unsur manajemen dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang pendidikan. Menurut Koswara Deni (2012:11-15) manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan sebuah kajian mengenai bagaimana sebuah pendidikan persekolahan harus di kelolah secara efektif, efisien, dan keadilan untuk mewujudkan mutu pendidikan (persekolahan) sebagaimana harapan.

Persaingan di dunia pendidikan semakin ketat, sehingga menuntut sekolah untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Pengelolaan sekolah yang efektif dapat menjamin tercapainya tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas lulusan siswa. Strategi pengelolaan sekolah yang baik dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti manajemen sumber daya manusia, teknologi, kerjasama dengan pihak eksternal, dan kebijakan dan regulasi. Namun, masih banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam menentukan dan menerapkan strategi pengelolaan yang tepat (Sirodjuddin, 2022).

Kolaborasi menjadi salah satu kekuatan era Revolusi Industri 4.0. Demikian pula halnya dengan kolaborasi pada sektor pemerintahan juga menjadi kekuatan tersendiri dalam menunjang keberhasilan tata kelola pemerintahan. *Collaborative governance* menjadi salah satu acuan dalam sebuah proses kegiatan pemerintahan dimana dengan berkolaborasi pemerintah mampu bersinergi dengan semua pihak dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dalam membangun sistem kelembagaan yang efektif, diperlukan adanya sistem jejaring yang kuat di masyarakat. Oleh sebab itu pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk dikembangkan.

SMA Negeri 16 Surabaya, pada tanggal 24 Juni 2011 dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008

dengan demikian manajemen yang dilaksanakan di SMA Negeri 16 Surabaya memenuhi standar internasional sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008, maka SMA Negeri 16 Surabaya dalam melaksanakan aktivitas didasarkan pada *Standart Operational Procedure* (SOP) yang telah disusun, sehingga tata kerja dan tata kelola sekolah menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. SMA Negeri 16 Surabaya berupaya mengoptimalkan penggunaan jaringan internet yang sudah ada di sekolah, agar peningkatan mutu sumber daya manusia dan mutu pendidikan dapat segera tercapai dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berbagai macam permasalahan pendidikan di Indonesia menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Permasalahan tersebut menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kualitas manusia yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pendidikan itu sendiri (Sujanto 2021). Fenomena emperikal dan teorikal yang tersistematis bersoal pada Manajemen Mutu dan Kualitas Pendidikan di SMAN 16 Surabaya adalah Perubahan kurikulum, kurikulum yang diterapkan juga terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya. Sehingga, sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain peserta didik, pendidik juga terkena dampaknya.

Pendidik akan terbebani dengan tugas yang banyak untuk mempelajari materi- materi dan tugas mengajari muridnya dengan materi yang banyak. Sehingga, tidak menutup kemungkinan pendidik menjadi kurang optimal dalam mengajari muridnya. Adanya penempatan guru ini masih kerap terjadi. Terutama penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatannya atau keahliannya dan Rendahnya Kualitas Guru

merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Collaborative Governance* pada Manajemen Mutu dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMAN 16 Surabaya.

B. LANDASAN TOERITIS.

1. Collaborative Governance

Smith & Susan, (2000:29) berpendapat bahwa *colaboratif* melibatkan representasi oleh kelompok kepentingan utama. Sementara Connick, Sarah, & Judith Innes, (177-180) mendefenisikan bahwa tatakelola kolaboratif melibatkan semua perwakilan kepentingan yang relevan. Begitupun dengan Reilly & Thom, (1998:115) menggambarkan upaya kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan pengerjaan bersamadari instansi pemerintah dan warga yang peduli. *Collaborative governance* adalah kerjasama atau kolaborasi yang dipahami melibatkan berbagai aktor dalam pemerintahan baik itu sektor swasta, pemerintah, dan *civil society*. *Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stake holder-non state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengatur program dan aset.

Dalam beberapa tahun terakhir para akedemisi menjadikan *collaborative governance* sebagai konsep yang unggul dalam kebijakan publik. Ditandai dengan banyaknya publikasi tulisan terkait *collaborative governance* baik dalam maupun luar negeri. Kegagalan dari implementasi, biaya mahal, dan politisasi regulasi sektor publik menjadi pemicu respon *collaborative governance*. Beragam anggapan mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan instrument dari kebijakan publik yang dapat menjadi tema

strategis. Mulai dari Gray, Jung, dan Emerson. *Collaborative governance* merupakan skema baru yang melibatkan multy stakeholder dalam urusan-urusan publik. Kolaborasi tidak sepenuhnya bisa disamakan dengan jaringan (*network*) dan kemitraan (*partnership*). Ansell dan Gash (2007:547-548)

menggambarkan, Jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya lebih plural, informal, dan implicit. Kemitraan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama yang berorientasi pada kordinasi dibandingkan konsensus dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama formal, eksplisit, dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Kemitraan terjadi ketika agen private sektor lebih aktif dalam menjalankan hal-hal publik. Sementara kolaborasi terjadi ketika agen private dan publik melakukan fungsi-fungsi aktif.

2. Manajemen Mutu Pendidikan

Sistem manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat segera mewujudkan Universitas unggul. Peguruan Tinggi sebagai wadah untuk mencetak/menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa, memerlukan suatu cara pengelolaan yang diatur dalam suatu manajemen yang efisien dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah jelas (Augustinah *et al.*, 2019).

Standar Pendidikan Nasioanal telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada tanggal 16 Mei 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 No.14. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan diseluruh

wilayah hukum negara kesatuan Replublik Indonesian.

Untuk mencapai standar tersebut harus ada penjaminan dan pengendalian dari senua aspek pengelolaan pendidikan. Tegasnya manajemen pendidikan dalam era otonomi daerah harus berusaha mencapai delapan standar pendidikan nasional. Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 dijelaskan secara rinci bahwa pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi:

- a) Pemersatu bangsa
- b) Penyamaan kesempatan
- c) Pengembangan potensi diri.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara kesatuan Replublik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan memungkinkan bagi setiap warga Negara mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Sementara itu, Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang- Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan sosial.

3. Kualitas Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah,

dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra- kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis maupun yang non- akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran (Umaedi, 1999).

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Menurut Creswell, pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995, dalam Creswell, 2010: 20)

Hasil penelitian ini merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai proses penerapan Collaborative Governance pada Manajemen Mutu dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan diSMAN 16 Surabaya.

2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2016:93), dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Fokus dari penelitian ini antara lain:

- a) Penerapan Collaborative Governance dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMAN 16 Surabaya dengan menggunakan teori konsep *collaborative governance* dari Ansell dan Gash.
- b) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penerapan Collaborative Governance pada Manajemen Mutu dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMAN 16 Surabaya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang dimana penelitian akan dilakukan. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan penelitian di lapangan adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami faktor serta rumusan masalah penelitian, untuk dapat melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada pada lapangan (Moleong, 2016:128). Dengan mempertimbangkan hal diatas dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian ini dilakukan di SMAN 16 Surabaya yang terletak di Jalan Raya Prapen Surabaya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal (*starting condition*)
Hal ini menekankan peran pemangku kepentingan yang berbeda dalam proses pemecahan masalah dan mengurangi potensi konflik dalam pembagian kewenangan dan sumber daya. Konsep ini sering digunakan dalam administrasi publik dan diadopsi pada tingkat lokal, dengan sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan bekerja sama dalam mengatasi masalah multi-faceted. Faktor kunci dalam pembentukan kolaborasi adalah ilmu pengetahuan, kepemimpinan, pengalaman, dukungan keuangan, dan kepemimpinan politik.
2. Desain Kelembagaan (*institutional design*)

Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia. Beberapa program peningkatan pendidikan yang dilakukan adalah memperbaiki proses pendidikan baik berupa pemenuhan sarana dan prasarana mutu, tata kelola, maupun kualitas implementasi kurikulum yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Secara sistematis, peningkatan dan pemerataan mutu yang dilakukan pemerintah secara berjenjang dan konsisten.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*facilitative leadership*)

Dalam kaitannya dengan pengelolaan kualitas pendidikan sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara Pemerintah, Swasta, akademisi dan masyarakat. Menurut crainer dalam fridayana (2013 :30) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan aktifitas untuk dapat mempengaruhi orang lain, dalam hal ini peranan kepala sekolah mampu mempengaruhi orang tua siswa untuk berpartisipasi.

4. Proses Kolaborasi

Dalam Proses Kolaborasi di SMAN 16 Surabaya, Pemerintah selalu melakukan Pendekatan melalui dialog dan berdiskusi bersama dengan orang tua siswa dan stakeholder. Setiap bulan selalu dilakukan rapat rutin membahas terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran. membangun kepercayaan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang turut dalam membantu proses keberlangsungan pendidikan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Penerapan *collaborative governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMAN 16 Surabaya yang

berlandaskan padateori Ansell dan Gash dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dimulai dari dialog tatap muka, membangun rasa percaya antar stakeholder, komitmen pada proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara ada dan telah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan posisi rating saat penerimaan siswa. yang cukup signifikan yang didorong dengan adanya partisipasi dari para stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi ini terbilang aktif dengan komitmen yang tinggi serta adanya program-program terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

- b. Adapun, faktor-faktor pendorong serta penghambat jalannya *collaborative governance* berdasarkan indikator kondisi awal kolaborasi yang bersifat saling membutuhkan dalam hal sumber daya, sejarah kolaborasi yang menjadi dasar terbangunnya rasa percaya antar stakeholders dalam kolaborasi ini, desain institusional yang jelas dan transparan, serta kepemimpinan fasilitatif yang berjalan baik menjadi faktor pendorong keberhasilan kolaborasi ini. Sementara itu, ego sektoral yang muncul di awal pelaksanaan mutu pendidikan ini menjadi hambatan dan tantangan dalam kolaborasi ini.

2. Saran

- a. Adanya peningkatan pemahaman terkait tujuan bersama terhadap masing-masing sektor untuk meminimalisir terjadinya ego sektoral juga peranan stakeholder sebagai fungsi koordinasi untuk meminimalisir terjadinya peranan yang bersifat dominasi yang dapat menumbuhkan ego sektoral dalam kolaborasi ini.
- b. Perlunya melibatkan peranan masyarakat seperti organisasi-organisasi masyarakat untuk bersama-sama mensosialisasikan kualitas pendidikan.
- c. Keterbukaan informasi secara eksternal

yakni informasi-imformasi berupa data dan informasi terkait standar kurikulum maupun pemahaman-pemahaman terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh publik

REFERENSI

- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders : Theory and Practice. Long Range Planning, 44(3), 179–196. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001>.
- Agustang, A., Mutiara, I. A., & Asrifan, A. (2021). Masalah Pendidika di Indonesia.
- Andi Prastowo. 2010. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: DIVA Press.
- Ansell, & Gash. (2007). Collaborative Governance in the Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18, 543-571.
- Aprilianto, Andika, Akhmad Sirojuddin, dan Abduloh Afif. “Strategi Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik.” FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2 (30 Januari 2022).
- Ara Hidayat dan Imam Machali, 2010. Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah. Bandung: Pustaka Educa.
- Arcaro, Jerome S. 2005. Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan) Penerjemah Yosol Irianta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Augustina, Fedianty & Widayati. (2019). “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Makanan Ringan Kripik Singkong Di Kabupaten Sampang. Jurnal Dialektika, 4(2): 1-20.
- Cline. (2000). Defening the Implementation Problem: Organizatonal Management Versus Cooperation. . Journal of Public Administration Research and Theory,

- 551-571.
- Connick, Sarah, & Judith Innes. (1977). Outcomes of Collaborative Water Policy Making: Applying Complexity Thinking to Evaluation. *Journal Environmental Planning and Management*, 46.
- Edward dan Sallis, 2004, *Manajemen Kualitas Total Dalam Pendidikan (Total Quality Management in Education)* Penerjemah : Kambey Daniel C, Manado : Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
- Edward Sallis. 2010. *Manajemen Mutu Terpadu*. Bogor: IRCiSoD. English, & May. (2000). Who Are The Stake Holders In Environmental Risk Decision? *Risk Health, Safety & Environmental*, 11, 54-243.
- Gray. (2001). Collaborating Finding Common Ground For Multy Party Problems. San Fransisco.: CA: Jossey-Bass. Hlm.
- Gunton, Thomas, & J.C Daya. (2003). The Theory and Practice of Collaborative Planning in Resource and Environmental Management. *Environmental Journal*, 31, 5-9.
- Huxam. (2003). Theorizing Collaboration Practice. *Public Management Review*, 5, 23-401.
- Iriawan, D. (2017). Collaborative Governannce (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif) Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5,3.
- Koswara, Deni, (2012). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lasker, & Weis. (2001). Patnership Synergy a Practical Frame Work For Studying and Strengthening The Vollaborative Advantage. *The Millbank Quarterly*, 2, 179-205.
- Lasker, & Weis. (2003). Broadening Participation in Community Problem Solving: a Multydisipliner Model to Support Collaborative Practice and Research. *Journal of Urban Health Bulletin Of New York Academi Of Medicine.*, 80, 14-60.
- Martin. (2008). Leadership, Service reform, and Public Service Networks: The Case of Cancer-Genetics Pilots in TheEnglish NHS. *Journlas of Public Administration Research and Theory.*, 19, 769-794.
- Matry, M Nurdin, 2008, *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*, Macasar: Aksara Madani.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mochamad Tajimudin, Achmad Sanusi, A. S. (2020). *Manajemen Sarana Prasarana Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Di Kota Bandung*. *Ner: Nusantara Education Review*, 3(2).
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Nurdin Matry. 2008. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Aksara Madani.
- Nurkholis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Purwanto, Ngalim. (2013). *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rather. (2012). *Collaborative Governance Assesment*. Malaysia: CGAR.
- Reilly, & Thom. (1998). . Communities in Conflict : Resolving Differences Through Collaborative Effort in Enviromental Planning and Human Service elivery. *Journal of Sosiology and Welfore*, 25, 115.
- Ryan, & Claire. (n.d.). Leadership ini Collaborative Policy Making : An analysis of agency roles in regulatory

- negotiations. *Polycy Sciences*, 5, 23-401.
- Smith, & Susan. (2000). . Collaborative Approaches to Pacific Northwest Fisheries Management: The Salmon Experience. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*. Willamete Journal of International Law and Dispute Resolution, 6, 29.
- Stoker, & Gerry. (2000). Governcance As Theory : Five Propotion. *Journal Of Community Practice*, 50, 17.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, Bedjo. 2021. Pengelolaan Sekolah: Permasalahan Dan Solusi. Bumi Aksara.
- Suriansyah, A., Agusta, A. R., & Setiawan, A. (2021). Model Blended learning ANTASARI untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah. *Journal of Economics Education and Entrepreneurship*, 2(2), 90. <https://doi.org/10.20527/jee.v2i2.4102>.
- Sutikno, Sobri . 2006. Pendidikan Sekarang dan Masa Depan. Mataram : NTPPress.
- Umaedi, 1999, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Weber, & Edward. (2003). Bringing Society Back in: Grassroots Ecosystem Management, Accountability, and Suistainable Communities. Cambridge: MIT Press
- Link :
<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/> di akses pada tanggal 20 Nopember 2023
- Pencapaian SDGs
<https://harian.disway.id/read/234503/kuota-terbatas-persaingan-ppdb-sma-negeri-di-jatim-ketat> di akses pada tanggal 20 Nopember 2023.= persaingan sekolah diJatim
- Versi Kemdikbudristek
<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6741657/20-sma-terbaik-di-surabaya-versi-kemdikbudristek-buat-referensi-ppdb-2023>
- Peraturan :
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendikanas No. 20 Tahun 2007
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional